



Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Garut

Reska Fadillah¹; Siska Marlina²; Hani Siti Hanifah³

Universitas Garut

24022121043@fekon.uniga.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Garut. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, survei, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah secara umum telah berjalan cukup efektif, tercermin dari tingginya capaian realisasi anggaran tahun 2023 sebesar 98%, kepatuhan terhadap regulasi, dan pelaksanaan program yang sesuai sasaran. Namun demikian, masih ditemukan sejumlah tantangan, seperti belum optimalnya pemanfaatan aset daerah, keterbatasan transparansi laporan keuangan kepada publik, serta perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, strategi penguatan perencanaan, akuntabilitas fiskal, dan literasi publik perlu terus ditingkatkan agar pengelolaan keuangan daerah dapat memberikan dampak yang lebih nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Efektivitas, Pengelolaan Keuangan Daerah, BPKAD Kabupaten Garut

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of regional financial management at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Garut Regency. A descriptive qualitative approach was used, with data collected through interviews, surveys, and document analysis. The findings indicate that regional financial management has been generally effective, as reflected in the high budget realization rate of 98% in 2023, compliance with regulations, and program implementation aligned with strategic goals. However, several challenges remain, including suboptimal utilization of regional assets, limited public transparency of financial reports, and the need to improve human resource capacity. Therefore, strengthening planning, fiscal accountability, and public financial literacy are essential to ensure that financial management contributes more significantly to community welfare.

Keywords: Effectiveness, Financial Management, BPKAD, Regional Budget, Garut Regency

1 Pendahuluan

Transformasi sistem pemerintahan Indonesia menuju desentralisasi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, menandai dimulainya era otonomi daerah. Dalam konteks ini, pengelolaan keuangan daerah menjadi aspek fundamental dalam menjamin kinerja pemerintahan yang efisien, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan publik (Azhari, 2019). Efektivitas pengelolaan keuangan menjadi tolok ukur keberhasilan daerah dalam memanfaatkan kewenangannya secara

optimal. Sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi instrumen utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. LKPD tidak hanya merupakan bentuk pertanggungjawaban keuangan, tetapi juga landasan bagi para pengambil kebijakan untuk melakukan evaluasi kinerja fiskal dan perencanaan pembangunan ke depan (Mahmudi, 2019).

Tabel 1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran Ta 2023	Realisasi Ta 2023	Realisasi Ta 2022	Selisih Realisasi Ta 2022-2023
1	Pendapatan Daerah	4.863.337.415.288,00	4.780.438.457.960,00	4.626.954.746.948,10	153.483.711.011,90
	Pendapatan Asli Daerah	527.550.074.727,00	535.631.250.765,00	486.038.766.410,10	49.592.484.354,90
	Pajak Daerah	171.972.000.000,00	173.835.653.663,00	157.571.464.634,00	16.264.189.029,00
	Retribusi Daerah	24.041.122.140,00	20.913.150.084,00	15.711.817.595,00	5.201.332.489,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.515.950.022,00	7.336.469.580,00	7.044.369.160,00	292.100.420,00
	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	324.021.002.565,00	333.545.977.438,00	305.711.115.021,10	27.834.862.416,90
	Pendapatan Transfer	4.297.220.792.497,00	4.219.407.436.264,00	4.081.264.360.586,00	27.834.862.416,90
	Pendapatan Transfer Dari Pusat - Dana Perimbangan	3.112.763.391.789,00	3.059.270.256.621,00	2.883.274.233.594,00	138.143.075.678,00
	Dana Bagi Hasil Pajak	122.122.189.391,00	125.759.918.410,00	129.254.394.668,00	175.996.023.027,00
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam	151.482.291.398,00	100.126.122.512,00	132.610.716.585,00	-3.494.476.258,00
	Dana Alokasi Umum	1.770.230.194.000,00	1.796.719.863.797,00	1.657.145.048.168,00	-32.484.594.073,00
	Dana Alokasi Khusus	1.068.928.717.000,00	1.036.664.351.902,00	964.264.074.173,00	72.400.277.729,00
	Pendapatan Transfer Dari Pusat - Lainnya	537.032.443.000,00	536.623.300.700,00	530.022.372.200,00	139.574.815.629,00
	Dana Transfer Lainnya	537.032.443.000,00		530.022.372.200,00	72.400.277.729,00
	Pendapatan Transfer Dari Provinsi	647.424.957.708,00	623.513.878.943,00	667.967.754.792,00	6.600.928.500,00
	Bagi Hasil Pajak	315.726.587.655,00	292.783.916.098,00	269.534.660.055,00	-530.022.372.200,00
	Bantuan Keuangan	331.698.370.053,00	330.729.962.845,00	398.433.094.737,00	-44.453.875.849,00
	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	38.566.548.064,00	25.339.770.391,00	59.651.619.952,00	23.249.256.043,00
	Pendapatan Hibah	20.557.890.000,00	10.507.849.500,00	46.365.278.610,00	-67.703.131.892,00
	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	18.008.658.064,00	14.891.921.431,00	13.286.341.342,00	1.605.580.089,00

Pemerintah Kabupaten Garut merupakan salah satu entitas daerah yang menunjukkan performa pengelolaan keuangan cukup baik. Berdasarkan data LKPD tahun 2023, realisasi anggaran pendapatan mencapai 98% dari total anggaran sebesar Rp4,86 triliun. Tingkat serapan yang tinggi ini menjadi indikasi administratif atas tercapainya target anggaran dan pelaksanaan program (BPKAD Garut, 2024). Namun demikian, capaian tersebut juga perlu dibaca sebagai momentum reflektif untuk terus meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal yang tidak hanya efisien dalam tataran teknis, tetapi juga berdampak terhadap kualitas layanan publik dan pembangunan manusia. Isu efektivitas pengelolaan keuangan semakin relevan ketika dikaitkan dengan upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kabupaten Garut yang memiliki IPM sebesar 68,32 (2023), masih berada di bawah rata-rata Jawa Barat, namun mencerminkan potensi besar untuk ditingkatkan melalui pengelolaan anggaran yang tepat sasaran. Strategi perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat menjadi kunci agar output keuangan dapat berdampak langsung terhadap pembangunan sosial-ekonomi.

Penelitian ini mengambil fokus pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Garut sebagai instansi teknis utama yang mengelola siklus keuangan daerah. Kajian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana efektivitas pengelolaan keuangan telah tercapai, meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, efisiensi, kepatuhan terhadap regulasi, serta pelaporan dan akuntabilitasnya. Seperti yang dilakukan oleh Putri et al. (2023) di Kabupaten Sumbawa dan Gendong et al. (2024) di Kabupaten Manggarai, yang menunjukkan pentingnya kualitas pengelolaan dalam memengaruhi kinerja fiskal daerah. Temuan dari berbagai daerah menunjukkan bahwa pencapaian pendapatan belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas manajerial, sehingga dibutuhkan pendekatan evaluatif yang komprehensif dan berbasis data.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Kantor BPKAD Kabupaten Garut, melalui indikator kinerja yang mencakup: pencapaian tujuan, kesesuaian kebutuhan, kepatuhan terhadap regulasi, efisiensi pelaksanaan, manfaat yang dirasakan, serta pelaporan dan akuntabilitas. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang adaptif, transparan, dan berorientasi pada hasil pembangunan.

2 Tinjauan Pustaka

2.1 Pengertian Manajemen

Manajemen merupakan proses mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan orang lain dalam upaya tercapainya suatu tujuan dalam organisasi dengan cara efisien juga efektif (Robbins & Coulter, 2018). Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya seminimal mungkin, sementara efektivitas menekankan pada pencapaian tujuan organisasi. Daft (2021) menambahkan bahwa manajemen melibatkan fungsi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian sebagai kerangka kerja sistematis untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pendekatan ini juga diperkuat oleh Jones & George (2020) yang menyatakan bahwa manajemen berperan penting dalam mengarahkan sumber daya guna mencapai hasil optimal. Dengan demikian, manajemen dapat disimpulkan sebagai suatu proses strategis dalam pengelolaan sumber daya untuk

2.2 Pengertian Akuntansi

Akuntansi merupakan proses sistematis yang mencakup pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, pengolahan, dan penyajian data keuangan yang bertujuan untuk menghasilkan informasi ekonomi yang relevan bagi pengambilan keputusan. Romney & Steinbart (2020) menjelaskan bahwa akuntansi tidak hanya mencatat transaksi, tetapi juga menyajikan informasi ekonomi yang berguna dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Dalam pandangan Wild & Shaw (2021), akuntansi juga berfungsi menyampaikan informasi keuangan melalui laporan kepada pihak internal maupun eksternal guna memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Menurut Mukhzarudfa & Putra (2019), akuntansi adalah sistem informasi keuangan yang dimulai dari pengidentifikasian hingga penyajian data, yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan ekonomi. Oleh karena itu, akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai instrumen vital dalam pengelolaan keuangan yang efektif dan bertanggung jawab.

Selain itu, akuntansi memiliki berbagai fungsi sebagaimana dikemukakan oleh Mulyadi (2016), yaitu:

- 1) Pencatatan transaksi ekonomi secara sistematis dan kronologis,
- 2) Pengklasifikasian ke dalam pos-pos seperti aset, kewajiban, pemasukan, dan pengeluaran,
- 3) Pelaporan informasi keuangan dalam bentuk laporan laba rugi, neraca, arus kas, dan catatan penjelas,
- 4) Pengendalian keuangan agar sumber daya digunakan sesuai rencana,

- 5) Penyediaan informasi akurat untuk mendukung pengambilan keputusan, serta
- 6) Menjamin kepatuhan terhadap standar pelaporan dan mendorong transparansi.

Dalam konteks sektor publik, khususnya pemerintah daerah, akuntansi diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan daerah sebagai media pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan publik. Setiawan (2019) menyatakan bahwa laporan keuangan daerah menyajikan posisi keuangan, aset, kewajiban, ekuitas, serta realisasi anggaran. Laporan ini memiliki empat komponen utama sebagaimana dijelaskan oleh Mahmudi (2019), yaitu: pernyataan realisasi anggaran, laporan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas.

Menurut Mardiasmo (2018), laporan keuangan daerah juga mencerminkan akuntabilitas publik, transparansi fiskal, dan perkembangan ekonomi daerah. Dengan demikian, akuntansi dalam lingkup pemerintahan daerah menjadi fondasi penting untuk membangun tata kelola keuangan yang baik (good governance), akuntabel, dan transparan.

2.3 Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan serangkaian aktivitas terstruktur yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan daerah (Mardiasmo, 2018). Menurut Halim & Kusufi (2018), pengelolaan keuangan daerah merupakan kegiatan sistematis dalam mengatur dan menggunakan dana publik berdasarkan prinsip efisiensi, pencapaian target, keterbukaan informasi, dan pertanggungjawaban. Proses ini menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan kewenangan daerah yang mandiri. Sementara itu, Mahmudi (2019) menekankan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan upaya optimalisasi sumber daya fiskal secara efisien dan efektif melalui perencanaan anggaran, alokasi dana, hingga pelaporan yang akuntabel kepada masyarakat. Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah suatu proses holistik dan berkelanjutan dalam mengelola fiskal daerah. Proses ini meliputi penyusunan kebijakan, pelaksanaan anggaran, pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, pertanggungjawaban publik, hingga pengawasan internal. Seluruh tahapan dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas sebagai landasan utama dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Pengelolaan yang profesional memungkinkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan sumber daya keuangan secara tepat guna, serta menyajikan pelaporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai bentuk tata kelola keuangan yang baik.

2.4 Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Efektivitas pengelolaan keuangan daerah merupakan ukuran sejauh mana pemerintah daerah mampu mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan anggaran, dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan tepat sasaran. Mardiasmo (2018) mendefinisikan efektivitas sebagai kemampuan mencapai hasil yang diinginkan dalam sistem keuangan. Susanto (2019) menambahkan bahwa efektivitas juga mencerminkan kontribusi keuangan terhadap kesejahteraan masyarakat, serta kesesuaiannya dengan kebutuhan dan harapan publik. Harahap (2019) menegaskan bahwa efektivitas menjadi indikator kunci dalam menilai keberhasilan manajemen dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi anggaran.

Tujuan utama dari analisis efektivitas ini adalah menilai pencapaian target pemerintah daerah, mengevaluasi kinerja program, memastikan efisiensi penggunaan anggaran, mengukur manfaat bagi masyarakat, serta menilai kesesuaian antara pelaksanaan dan perencanaan keuangan (Mardiasmo, 2018). Efektivitas pengelolaan keuangan dapat ditinjau melalui beberapa dimensi, seperti:

- 1) Pencapaian tujuan, dilihat dari kesesuaian program dengan rencana dan capaian target anggaran.
- 2) Kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, terkait alokasi dana yang bermanfaat secara nyata.
- 3) Kepatuhan terhadap regulasi, memastikan tidak adanya pelanggaran anggaran.
- 4) Efisiensi pelaksanaan, dengan meminimalkan pemborosan sumber daya.

- 5) Manfaat yang diterima, berupa dampak program terhadap kesejahteraan masyarakat.
- 6) Transparansi dan akuntabilitas, yang ditunjukkan melalui pelaporan keuangan yang terbuka dan dapat diakses publik (Mardiasmo, 2018).

Efektivitas ini dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci, antara lain perencanaan anggaran yang matang (Mardiasmo, 2018), kompetensi sumber daya manusia (Nugroho, 2020), sistem pengendalian internal yang kuat Susanto (2019), transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan (Grisation, 2020), pemanfaatan teknologi informasi (Harahap, 2019), serta peran kepemimpinan dan budaya organisasi yang mendukung kinerja berbasis akuntabilitas (Irawan, 2019). Dengan demikian, efektivitas pengelolaan keuangan daerah tidak hanya mencerminkan pencapaian teknis dan administratif, tetapi juga menjadi indikator kualitas tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

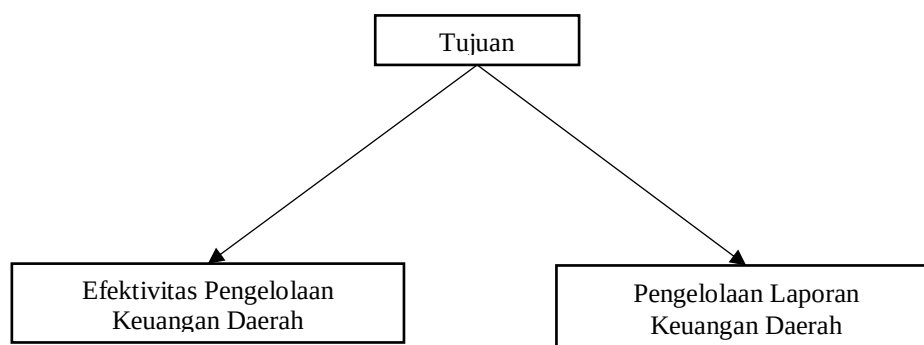
2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berfungsi sebagai dasar teoritis dalam merancang model analisis efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Efektivitas tersebut didefinisikan sebagai kapasitas pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan melalui perencanaan anggaran, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal.

Efektivitas pengelolaan keuangan daerah sangat berkaitan dengan pencapaian hasil yang diharapkan dari sistem keuangan publik (Mardiasmo, 2018). Untuk menilai efektivitas ini, digunakan enam dimensi utama sebagai indikator yang komprehensif, yaitu:

- 1) Pencapaian Tujuan (*Goal Achievement*): Mengukur kesesuaian antara program/kegiatan dengan rencana, serta sejauh mana target kinerja anggaran tercapai.
- 2) Kesesuaian dengan Kebutuhan (*Relevance*): Menilai apakah kegiatan yang didanai menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat nyata.
- 3) Kepatuhan terhadap Peraturan (*Compliance*): Memastikan pelaksanaan program sesuai peraturan perundang-undangan, tanpa pelanggaran anggaran.
- 4) Efisiensi Pelaksanaan (*Efficiency in Implementation*): Mengkaji optimalisasi penggunaan anggaran, waktu, dan tenaga, serta upaya meminimalkan pemborosan.
- 5) Manfaat yang Diterima (*Outcome and Impact*): Mengukur dampak nyata program terhadap kesejahteraan masyarakat.
- 6) Pelaporan dan Akuntabilitas (*Transparency and Accountability*): Menekankan pentingnya pelaporan keuangan yang terbuka, dapat diakses publik, dan akuntabel.

Dimensi-dimensi ini menjadi kerangka evaluatif dalam menganalisis efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menggambarkan kondisi aktual, tetapi juga memberikan wawasan untuk perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola keuangan yang akuntabel, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik.



Gambar 1 Model Penelitian

3 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah secara mendalam. Metode ini menekankan pada pengumpulan data melalui wawancara, survei, dan observasi, dengan peneliti sebagai instrumen utama (Sugiyono, 2019). Data primer diperoleh dari wawancara dengan informan di BPKAD Kabupaten Garut, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen seperti Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Teknik pengumpulan data mencakup studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis berfokus pada enam dimensi efektivitas menurut Mardiasmo (2018), seperti pencapaian tujuan, efisiensi, dan akuntabilitas. Informan dipilih secara purposive, melibatkan pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan. Data dianalisis melalui tiga tahap: pengumpulan, reduksi, dan verifikasi (Sugiyono, 2019). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai pihak, termasuk Inspektorat Kabupaten Garut.

4 Hasil dan Pembahasan.

4.1 Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Garut

Efektivitas pengelolaan keuangan daerah menjadi tolok ukur dalam menilai sejauh mana kebijakan anggaran mampu dijalankan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penilaian ini dianalisis melalui beberapa dimensi utama yang mencerminkan kualitas tata kelola keuangan daerah, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Indikator: Program atau kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
Program pengelolaan keuangan daerah oleh BPKAD Kabupaten Garut telah disusun dan dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja tahunan, RPJMD, dan perjanjian kinerja antara pejabat struktural. Hal ini mencerminkan kepatuhan terhadap prosedur, strategi, serta tupoksi instansi. Berdasarkan LAKIP tahun 2023, indikator keberhasilan program menunjukkan hasil maksimal, seperti penyusunan anggaran yang tepat waktu (100%), penyerapan anggaran melebihi target (102,04%), pelaporan APBD tepat waktu (100%), serta keberhasilan inventarisasi aset (105,26%). Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan BPKAD pun mencapai 100%, menunjukkan kesesuaian pelaksanaan program dengan harapan dan kebutuhan publik.
- 2) Indikator: Target kinerja yang telah ditetapkan dalam anggaran dapat terpenuhi
Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Garut tahun 2023 tercapai sebesar Rp4,78 triliun dari target Rp4,86 triliun, atau 98,30%. Pendapatan Asli Daerah bahkan melampaui target dengan capaian 101,53%. Namun, pos "Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah" hanya terealisasi 65,70%, menunjukkan perlunya optimalisasi pendapatan non-prioritas.

Tabel 2 Realisasi Program Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023

NO	SUMBER PENDAPATAN	TA 2022		TA 2023	
		(RP)	(%)	(RP)	(%)
1.	Pendapatan Asli Daerah	486.038.766.410,10	100,33	535.631.250.765,00	101,53
2.	Pendapatan Transfer	4.081.264.360.586,00	98,55	4.219.407.436.264,00	98,19
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	59.651.619.952,00	132,47	25.399.770.931,00	65,86
	Jumlah	4.626.954.746.948,10	99,06	4.780.438.457.960,00	98,30

Hambatan lain yang memengaruhi ketercapaian target antara lain perubahan kebijakan transfer pusat, terutama terkait DAU untuk PPPK, serta konsentrasi penyerapan anggaran pada triwulan IV akibat tidak konsistennya pelaksanaan anggaran kas oleh beberapa SKPD. Meskipun demikian, sebagian besar target kinerja dapat dikatakan tercapai dan menunjukkan efektivitas pengelolaan anggaran daerah. Untuk peningkatan kinerja dapat ditingkatkan pada peningkatan pendapatan hasil daerah terutama dari kesadaran pajak karena kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (Bahiyah & Yuniarti, 2023)

- 3) Indikator: Program atau kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

BPKAD Kabupaten Garut telah mengarahkan anggarannya pada program yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, seperti bantuan sosial dan infrastruktur. Namun, menurut Inspektorat, manfaat nyata lebih terasa untuk perbaikan tata kelola internal dibanding langsung dirasakan oleh masyarakat.

Tabel 3 Realisasi Anggaran Retribusi Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Pencapaian
Retribusi Daerah	24.041.122.140,00	20.913.150.084,00	86,99%

Capaian retribusi daerah hanya sebesar 86,99% dari target, menunjukkan kemungkinan adanya ketidaksesuaian antara layanan yang disediakan dengan kebutuhan riil masyarakat. Hal ini menandakan perlunya evaluasi menyeluruh terkait strategi pengelolaan retribusi, termasuk pemetaan potensi, penyesuaian tarif, dan peningkatan kualitas layanan. BPKAD telah merespons hal ini dengan menyusun strategi peningkatan pelayanan dan edukasi publik untuk memperkuat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban daerah. Fenomena serupa juga terlihat pada kepatuhan pajak non-konvensional seperti pajak atas aktivitas endorsement, yang menunjukkan bahwa ketidakjelasan regulasi dan kurangnya literasi perpajakan dapat menyebabkan potensi pendapatan daerah tidak tergalai secara maksimal (Kautsar et al., 2024).

- 4) Indikator: Dana dialokasikan untuk kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat
Pendapatan daerah tahun 2023 secara umum menunjukkan tren positif, terutama dari sektor pajak daerah dan transfer pemerintah pusat, yang mencerminkan relevansi program dengan kebutuhan masyarakat. Namun, realisasi dari sektor retribusi dan pengelolaan kekayaan daerah masih rendah, menandakan perlunya perbaikan layanan publik dan optimalisasi pemanfaatan aset. Meskipun transfer dari pusat dan provinsi cukup tinggi dan sebagian melebihi ekspektasi, beberapa sektor seperti bagi hasil sumber daya alam dan hibah belum maksimal. Secara keseluruhan, program BPKAD telah menunjukkan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, namun tetap dibutuhkan evaluasi terhadap sektor-sektor yang belum optimal agar pengalokasian anggaran lebih responsif dan berdampak nyata.
- 5) Indikator: Program atau kegiatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
BPKAD Kabupaten Garut memastikan bahwa seluruh program dan anggaran telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Inspektorat juga menilai pelaksanaan program cukup sesuai dengan regulasi karena BPKAD pada dasarnya hanya menyalurkan kebutuhan anggaran dari OPD-OPD terkait. Penyusunan Laporan Kinerja BPKAD tahun 2023 telah mengikuti Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014, dan laporan keuangan tahun 2023 telah disusun tepat waktu berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, serta standar akuntansi pemerintahan (PP 71 Tahun 2010 dan Permendagri 64 Tahun 2013). Hal ini menunjukkan kepatuhan yang kuat terhadap aspek legal dan prosedural dalam pengelolaan keuangan daerah.
- 6) Indikator: Tidak adanya pelanggaran dalam penggunaan anggaran
BPKAD menerapkan pengawasan penggunaan anggaran secara ketat dan berpedoman pada regulasi yang berlaku. Audit dan pemeriksaan rutin dilakukan oleh Inspektorat untuk menjamin akuntabilitas. Meskipun demikian, Inspektorat mencatat masih terdapat kendala dalam hal transparansi akses informasi keuangan bagi pihak tertentu. Namun, secara umum kinerja dinilai baik dengan tingkat serapan anggaran mencapai 98%, yang mencerminkan kepatuhan operasional terhadap penggunaan anggaran. Penelitian (Suryani et al., 2024) juga mendukung bahwa sistem pelaporan yang kuat dan adanya mekanisme pengungkapan dini, seperti *whistleblowing*, dapat memperkuat efektivitas audit forensik dalam mengungkap potensi kecurangan anggaran.
- 7) Indikator: Penggunaan sumber daya optimal
BPKAD Kabupaten Garut menyatakan bahwa program-program yang dirancang telah diarahkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk infrastruktur dasar. Tingkat serapan anggaran pendapatan daerah mencapai 98%, yang menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah mendekati optimal. Namun, dari sisi efisiensi pelaksanaan, Inspektorat mengidentifikasi beberapa kendala seperti kecenderungan menunda pekerjaan dan lemahnya koordinasi tim. LAKIP 2023 juga mencatat belum meratanya distribusi

tenaga kerja yang kompeten, sehingga dibutuhkan peningkatan kapasitas dan pelatihan teknis untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan SDM.

8) Indikator: Minimalisasi pemborosan

Meskipun serapan anggaran tergolong tinggi, penurunan penerimaan pendapatan dari tahun 2022 ke 2023 mengindikasikan potensi inefisiensi, khususnya pada pos pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain yang sah.

Tabel 4 Laporan Perkembangan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah

NO	SUMBER PENDAPATAN	TA 2022		TA 2023	
		(RP)	(%)	(RP)	(%)
1.	Pendapatan Asli Daerah	486.038.766.410,10	100,33	535.631.250.765,00	101,53
2.	Pendapatan Transfer	4.081.264.360.586,00	98,55	4.219.407.436.264,00	98,19
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	59.651.619.952,00	132,47	25.399.770.931,00	65,86
	Jumlah	4.626.954.746.948,10	99,06	4.780.438.457.960,00	98,30

Perubahan kebijakan DAU, yang difokuskan pada pembiayaan PPPK, menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam melakukan penyesuaian anggaran. Selain itu, optimalisasi kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) belum berjalan maksimal, menyebabkan potensi pendapatan dari sektor ini belum tergali secara optimal. Penurunan ini menegaskan bahwa efisiensi fiskal belum sepenuhnya tercapai, meskipun anggaran terserap tinggi. Hal ini sejalan dengan temuan (Farida et al., 2025) yang menunjukkan bahwa penerimaan daerah, khususnya dari sektor pajak hotel dan restoran, masih dipengaruhi oleh variabel-variabel struktural lain di luar target fiskal semata.

9) Indikator: Program atau kegiatan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat

BPKAD Kabupaten Garut menyatakan bahwa sebagian besar anggaran daerah dialokasikan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Tabel 5 Laporan Belanja Daerah BPKAD Garut Periode 2022 - 2023

No	Uraian	TA 2023	TA 2022
1	Pembayaran Pegawai	Rp1.623.923.894.714,00	Rp1.678.298.468.729,00
2	Pembayaran Barang	Rp1.324.307.932.451,00	Rp1.142.664.116.391,00
3	Pembayaran Subsidi	Rp1.111.000.000,00	Rp951.000.000,00
4	Pembayaran Hibah	Rp426.855.242.357,00	Rp380.148.919.928,00
5	Pembayaran Bantuan Sosial	Rp33.267.120.750,00	Rp25.874.389.999,00
6	Pembayaran Tak Terduga	Rp5.907.754.376,00	Rp28.771.620.642,00
7	Pembayaran Bagi Hasil ke Desa	Rp19.333.448.767,00	Rp17.422.666.527,00
8	Pembayaran Bantuan Keuangan	Rp697.071.729.150,00	Rp713.300.459.889,00
	Jumlah s	Rp4.131.778.122.565,00	Rp3.987.431.642.105,00

Hal ini tercermin dari peningkatan total belanja daerah tahun 2023 yang mencapai Rp4,13 triliun, naik dari tahun sebelumnya sebesar Rp3,98 triliun. Peningkatan ini tersebar pada berbagai pos strategis seperti belanja barang, bantuan sosial, hibah, dan bagi hasil ke desa. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat pelayanan dasar, dukungan terhadap komunitas lokal, dan perlindungan kelompok rentan. Namun, Inspektorat mencatat bahwa komposisi anggaran masih belum ideal, di mana belanja pegawai masih mendominasi dan alokasi untuk infrastruktur belum optimal. Selain itu, penyesuaian terhadap regulasi baru terkait Dana Alokasi Umum (DAU) juga menjadi tantangan tersendiri dalam perencanaan program. Temuan ini sejalan dengan pendapat Anugrahwaty & Mediaty (2021) bahwa efektivitas anggaran bukan hanya soal serapan tinggi, tetapi sejauh mana manfaat tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

10) Indikator: Dampak program terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat diukur

BPKAD Garut menyampaikan bahwa dampak program terhadap kesejahteraan masyarakat dapat dilihat melalui indikator-indikator seperti tingkat kemiskinan dan Indeks

Tabel 6 Perkembangan Indikator Kemiskinan Kabupaten Garut Tahun 2019 - 2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	301.202	310.437	320.050	335.134	367.681
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	235,19	262,78	281,36	276,67	260,48
Persentase Penduduk Miskin (%)	8,98	9,98	10,65	10,42	9,77
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,87	0,97	1,4	1,81	1,17
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,16	0,15	0,29	0,45	0,23

Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin mengalami penurunan dari 10,42% pada 2022 menjadi 9,77% pada 2023, meskipun masih di atas rata-rata provinsi dan nasional. Secara absolut, jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 16.190 jiwa. Meskipun tren menurun, realisasi angka kemiskinan masih belum sesuai target RPJMD, dengan capaian hanya 76,36% pada tahun 2023. Kenaikan garis kemiskinan sebesar 9,71% juga menjadi faktor yang memengaruhi dinamika jumlah penduduk miskin.

Tabel 7 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kemiskinan Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Orang)		Persentase Penduduk Miskin (%)
	Target	Realisasi	% Capaian Target Tahunan
2019	265.769	235.190	111,51%
2020	252.110 - 265.410	262.780	98,75%
2021	240.960 - 254.380	281.360	86,40%
2022	227.670 - 230.670	276.670	79,27%
2023	209.170 - 212.170	260.480	76,36%

Sementara itu, IPM Kabupaten Garut tahun 2023 mencapai 68,11 poin, atau 98,53% dari target tahunan. Angka ini menunjukkan kenaikan 1,03% dari tahun sebelumnya dan mencerminkan kemajuan dalam tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran. Capaian tertinggi terdapat pada Indeks Kesehatan dan Harapan Hidup, yang masing-masing melebihi target.

Tabel 8 Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Realisasi	Target	% Capaian
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	68,11	68,63 - 69,62	98,53%
A	Indeks Pendidikan	Poin	59,91	60,46 - 62,35	97,57%
A.1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,16	12,07 - 12,15	100,41%
A.2	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,84	8,08 - 8,58	94,12%
B	Indeks Kesehatan	Poin	80,11	79,83 - 80,03	100,22%
B.1	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,07	71,89 - 72,02	100,16%
C	Indeks Pengeluaran	Poin	65,83	64,09 - 64,15	97,82%
C.1	Pengeluaran per kapita	Ribu Rp	8.685	9.012,5 - 9.212,5	95,31%

Namun, tantangan tetap ada, terutama pada Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran per Kapita yang belum mencapai sasaran. Meski peringkat IPM Garut masih berada di urutan ke-25 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, laju pertumbuhan IPM Garut cukup signifikan dan melampaui rata-rata pertumbuhan provinsi dan nasional.

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa program-program BPKAD telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik melalui perbaikan indikator sosial ekonomi maupun melalui penguatan fondasi pembangunan manusia.

11) Indikator: Pelaporan keuangan dilakukan secara transparan dan akuntabel

BPKAD Kabupaten Garut telah menjalankan sistem pelaporan keuangan yang menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas. Laporan-laporan keuangan sebagian besar telah dipublikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana 95% laporan realisasi anggaran telah tersedia untuk publikasi. Namun, Inspektorat mencatat masih adanya hambatan berupa keterlambatan dalam pelaporan pada triwulan kedua dan ketiga, yang menunjukkan perlunya peningkatan pada aspek kecepatan dan ketepatan waktu pelaporan. Selain itu, meskipun sistem pelaporan berjalan baik, akses terhadap laporan tersebut belum merata bagi seluruh pemangku kepentingan, sehingga diperlukan strategi perbaikan dalam penyampaian informasi agar prinsip akuntabilitas dapat diterapkan secara menyeluruh.

12) Indikator: Informasi keuangan dapat diakses oleh publik untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah

Pertanggungjawaban publik diwujudkan melalui keterbukaan informasi keuangan yang dapat diakses luas. BPKAD memfasilitasi hal ini melalui situs web dan papan pengumuman. Namun, hasil wawancara menunjukkan masih ada kesulitan masyarakat dalam mengakses dan memahami informasi tersebut. Karena itu, perlu perluasan saluran informasi dan penyajian data yang lebih sederhana. Penyusunan ringkasan laporan keuangan yang edukatif diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan dan kepercayaan publik. Transparansi bukan hanya soal publikasi, tetapi juga tentang kemudahan pemahaman dan pemanfaatan informasi oleh masyarakat..

5 Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan keuangan daerah oleh BPKAD Kabupaten Garut secara umum telah berjalan cukup efektif, meskipun masih memerlukan perbaikan di beberapa aspek. Dari dimensi pencapaian tujuan, program telah dilaksanakan sesuai rencana dan menunjukkan kinerja optimal, namun masih diperlukan upaya dalam diversifikasi pendapatan dan efisiensi dana khusus. Pada dimensi kesesuaian dengan kebutuhan, program telah diarahkan pada kepentingan publik, namun manfaat nyata bagi masyarakat belum sepenuhnya optimal, khususnya dalam pendapatan retribusi dan layanan publik.

Dari sisi kepatuhan terhadap peraturan, pengelolaan keuangan telah sesuai regulasi, meskipun transparansi informasi masih terbatas bagi publik. Dalam hal efisiensi pelaksanaan, penggunaan anggaran cukup optimal, namun koordinasi antar tim dan distribusi SDM masih menjadi hambatan. Dimensi manfaat yang diterima menunjukkan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat melalui belanja sosial dan pendidikan, meski alokasi untuk infrastruktur masih perlu ditingkatkan.

Terakhir, pada dimensi pelaporan dan akuntabilitas, sistem pelaporan telah dibangun dengan baik, tetapi penyampaian dan pemahaman informasi publik masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, penguatan literasi keuangan dan kemudahan akses informasi menjadi langkah penting untuk mendorong transparansi dan partisipasi publik dalam pengelolaan keuangan daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh, maka saran yang dapat diajukan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah oleh BPKAD Kabupaten Garut terbagi ke dalam tiga aspek, yaitu saran teoritis, praktis, dan untuk penelitian selanjutnya:

a. Saran Teoritis

- 1) Penguatan Konsep Efektivitas Anggaran dalam Perspektif Pembangunan Daerah
Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas tidak hanya diukur dari tingkat serapan anggaran dan pencapaian target administratif, melainkan juga dari seberapa besar dampak program terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, teori efektivitas anggaran perlu diperluas dengan memasukkan indikator sosial-ekonomi seperti tingkat kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai ukuran keberhasilan pengelolaan keuangan.
- 2) Relevansi dan Pengembangan Teori *Good Governance*
Hasil penelitian menguatkan pentingnya prinsip-prinsip good governance, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, teori ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan unsur literasi keuangan dan keterbukaan informasi sebagai indikator penting dalam pengelolaan keuangan daerah.
- 3) Penguatan Model Evaluasi Program Publik
Temuan dalam penelitian ini menunjukkan pentingnya model evaluasi program yang menyeluruh, yang mencakup unsur input, proses, output, outcome, hingga impact. Pendekatan ini dapat memperkuat evaluasi kinerja keuangan daerah dengan menekankan kesinambungan antara efisiensi, kepatuhan terhadap regulasi, dan hasil jangka panjang.

b. Saran Praktis

- 1) Peningkatan Kapasitas dan Koordinasi Sumber Daya Manusia
BPKAD perlu meningkatkan koordinasi lintas instansi, seperti dengan Inspektorat, Bappeda, dan OPD lainnya. Hal ini dapat dilakukan melalui forum komunikasi rutin, penyusunan SOP terpadu, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mempermudah sinkronisasi pelaporan dan perencanaan anggaran.
 - 2) Penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, Pemda harus mengoptimalkan PAD dengan cara memperbaiki sistem pemungutan pajak dan retribusi, memperluas basis pajak, serta menggali potensi ekonomi lokal yang sah dan sesuai regulasi.
 - 3) Meningkatkan Transparansi dan Aksesibilitas Informasi Keuangan
BPKAD disarankan memperluas dan mempermudah akses publik terhadap laporan keuangan, misalnya melalui situs resmi, media sosial, atau platform publikasi yang ramah pengguna. Selain itu, edukasi dan pelatihan literasi keuangan bagi ASN maupun masyarakat umum perlu ditingkatkan untuk memperkuat akuntabilitas publik.
 - 4) Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Terintegrasi
Diperlukan integrasi sistem informasi keuangan yang real-time dan akurat guna mendukung efisiensi pengelolaan anggaran. BPKAD dapat menggandeng Dinas Kominfo atau pihak eksternal untuk mengembangkan sistem pelaporan dan monitoring berbasis digital yang transparan, mudah diakses, dan akomodatif terhadap kebutuhan pengguna.
- c. Saran untuk Peneliti Selanjutnya
- Penelitian ke depan disarankan untuk menambahkan variabel-variabel lain yang relevan dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti kepemimpinan, budaya organisasi, atau respons terhadap kebijakan fiskal nasional. Selain itu, pendekatan penelitian dapat diperdalam menggunakan metode kualitatif atau *mixed-methods*, khususnya dalam mengevaluasi implementasi sistem informasi digital dan efektivitasnya terhadap kinerja keuangan daerah.

Daftar Pustaka

- Anugrahwaty, N., & Mediaty, J. (2021). Analysis of Efficiency and Effectiveness of Regional Financial Management in Mamuju District, Mamuju Regency. In *Quest Journals Journal of Research in Business and Management* (Vol. 9). www.questjournals.org
- Azhari, A. K. (2019). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Intrans Publishing.

- Bahiyyah, K., & Yuniarti, R. (2023). The Affect of Tax Awareness, Tax Service, and Tax Penalty on The Tax Compliance (A Case Study on the District's Treasurer in Garut Regency). *Jurnal Wacana Ekonomi*. <https://doi.org/https://doi.org/10.52434/jwe.v22i3.2999>
- Daft, R. L. (2021). *Management* (14th ed.). Cengage Learning.
- Edwin Gendong, A., Tameno, N., & E. de Rozari, P. (2024). Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai. *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(09), 3476–3495. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1156>
- Farida, D., Hamdah, L., & Wahyuni, R. S. (2025). The Influence of Hotel Tax and Restaurant Tax on the Original Regional Income of Garut Regency. *Jurnal Wacana Ekonomi*, 24(2), 124–131. <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JA/article/view/42348/2477>
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2018). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Harahap, S. S. (2019). *Akuntansi: Konsep dan Implementasi*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Jones, G. R., & George, J. M. (2020). *Essentials of Contemporary Management* (8th ed.). McGraw-Hill Education.
- Kautsar, M. Al, Fauziah, H., Rismanto, H., & Ervianisya, V. (2024). A Review of Tax Imposition on Endorsement Activities by Influencers in Garut Regency. *Jurnal Wacana Ekonomi*, 24(01), 14–27. <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JA/article/view>
- Mahmudi. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Uji Press.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi.
- Mukhzarudfa, H., & Putra, W. E. (2019). *Akuntansi Manajemen: Suatu Pengantar*. Salim Media Indonesia.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat.
- Putri, N. H., Mandasari, J., & Syahfitri, D. I. (2023). PENGUKURAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018-2021. *Jurnal EK&BI*.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2018). *Management* (14th ed.). Pearson.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2020). *Accounting Information Systems*. Pearson Education.
- Setiawan, I. (2019). *Kebijakan Perencanaan APBD Optimalisasi dan Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suryani, I., Setiawan, A., & Djajadikerta, H. (2024). Whistleblowing System in Forensic Audit for Fraud Disclosure. *Jurnal Wacana Ekonomi*, 01(01), 1–13. <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JA/article/view/4198/2353>
- Susanto, M. F. (2019). *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Mitra Utama.
- Wild, J. J., & Shaw, K. W. (2021). *Fundamentals of Financial Accounting*. McGraw-Hill Education.